

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DAN IMPLIKASINYA DALAM  
PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG  
DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA**

Tesis

Oleh:

**Tommy Tri Yunanto**

**202120251062**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
JAKARTA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

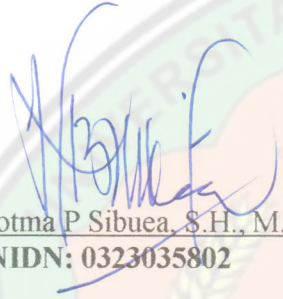
Judul Tesis : Pengembalian Kerugian Negara dan Implikasinya  
Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana  
Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa  
Nama Mahasiswa : Tommy Tri Yunanto  
Nomor Induk Mahasiswa : 202120251062  
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum


Jakarta, 7 Februari 2023

MENYETUJUI :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.Hum  
NIDN: 0323035802

  
Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.  
NIDN: 0319077606



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Pengembalian Kerugian Negara Dan Implikasinya  
Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana  
Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa.

Nama Mahasiswa : Tommy Tri Yunanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251062

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 15 Februari 2023

Jakarta, Februari 2023

### MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.  
NIDN : 0324015802

Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.  
NIDN : 0323035802

Penguji II : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.  
NIDN : 0312117102

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.  
NIDN : 8879190019

  
Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum.  
NIDK : 0127117401

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DAN IMPLIKASINYA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 20 Februari 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



Tommy Tri Yunanto  
202120251062

## ABSTRAK

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 yang berbunyi: “Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999. Akibatnya kerugian negara bukan hanya sekedar potensial saja yang belum dapat ditentukan secara pasti jumlahnya namun harus dapat dibuktikan. Sehingga penanganan tindak pidana korupsi menjadi lebih sulit, terlebih ketika pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah: (1) Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa? (2) Apakah implikasi pengembalian kerugian Negara dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa dapat menghilangkan sifat pidananya? Kerangka pemikiran dalam penelitian menggunakan teori negara hukum, teori pengembalian aset dan teori kerugian negara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif dan meneliti bahan hukum pustaka yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penghapusan frasa “dapat” Pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berimplikasi kepada pergeseran delik tindak pidana korupsi, yang awalnya formiil menjadi materiil. Kualifikasi tindak pidana korupsi sebagai delik materiil mengharuskan aparaturnya penegak hukum harus menentukan jumlah kerugian keuangan negara secara nyata, padahal lembaga yang berwenang dalam menentukan jumlah kerugian negara masih tumpang tindih sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses pemberantasan tindak pidana korupsi. (2) Pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak menghapus tindak pidananya. Dengan pengembalian kerugian negara maka sejatinya telah menyebutkan adanya kerugian negara yang terjadi sebelumnya.

**Kata Kunci : Kerugian Negara, Tindak Pidana, Korupsi, dan Kepala Desa**

## ABSTRACT

*Ruling of the Constitutional Court Number: 25/PUU-XIV/2016 which reads: "Stating the word "can" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 of 1999. As a result, state losses are not just potential The amount can be determined with certainty but must be proven. So that the handling of criminal acts of corruption becomes more difficult, especially when the perpetrators have returned state financial losses. Based on this, the formulation of the problem in this thesis is: (1) What are the implications of the Constitutional Court decision Number 25/PUU-XIV/2016 for corruption crimes committed by village heads? (2) Does the implication of returning state losses in the process of enforcing the law on corruption committed by the village head eliminate its criminal nature? The framework of thought in this research uses the rule of law theory, the theory of return on assets and the theory of state losses.*

*This research uses a normative juridical research type with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal sources. Material collection techniques are carried out by identifying and inventorying positive legal rules and examining legal literature materials that are relevant to the legal issues being studied. Legal material analysis techniques are carried out by means of legal interpretation (interpretation) and legal construction methods.*

*The results of the study show that (1) The deletion of the phrase "can" in Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption has implications for a shift in criminal offenses Corruption, which was initially formal, became material. The qualification of corruption as a material offense requires law enforcement officials to determine the real amount of state financial losses, even though the institutions authorized to determine the amount of state losses still overlap, causing legal uncertainty and slowing down the process of eradicating corruption. (2) Returning state losses for acts of corruption committed by the Village Head does not erase the crime. By returning state losses, it has actually been stated that there were state losses that occurred before.*

**Keywords**

**: State Losses, Crime, Corruption, and Village Head**

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DAN IMPLIKASINYA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA.**” ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, M.M.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bapak Dr. H. Slamet Pribadi, S.H.,M.Hum.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
4. Pembimbing I, Bapak Dr.Hotma P Sibuea, S.H., M.Hum. dan Pembimbing II, Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bahayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami IlmuHukum.
6. Bapak/Ibu di Sekretariat Program Studi Magister Ilmu Hukum, atas bantuannya selama Penulis menjadi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara JakartaRaya.
7. Bapak, Ibu, Mertua, Istri Anggrini, Anak Fathia Idelia Yunanto dan Nabila Raniya Yunanto yang telah memberikan doa dan cinta kasihnya kepada saya hingga terselesaikannya tesis ini.

Jakarta, 20 Februari 2023  
Penulis,



**TOMMY TRI YUNANTO**  
**202120251062**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5. Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1. Teori Negara Hukum.....	9
1.5.2. Teori Pengembalian Aset.....	12
1.5.3. Teori Kerugian Negara.....	16
1.6. Metode Penelitian.....	17

viii



1.6.1. Jenis Penelitian.....	17
1.6.2. Pendekatan Penelitian .....	18
1.6.3. Sumber Bahan Hukum .....	18
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
2.1. Tinjauan tentang Kerugian Negara .....	21
2.2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi .....	31
2.3. Tinjauan tentang Pemerintahan Desa .....	49
2.3.1. Pengertian Desa.....	49
2.3.2. Alokasi Dana Desa.....	52
2.3.3. Pembanguna Desa.....	58
<b>BAB III IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DESA .....</b>	<b>61</b>
3.1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 .....	61
3.2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Kepala Desa.....	68

<b>BAB IV IMPLIKASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN KEPALA DESA .....</b>	<b>79</b>
4.1. Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi Dana Desa di Indonesia .....	79
4.2. Implikasi Pengembalian Kerugian Negara dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Kepala Desa .....	120
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>130</b>
5.1. Kesimpulan.....	130
5.2. Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>132</b>
A. Buku-Buku.....	132
B. Jurnal dan Artikel .....	136
C. Peraturan Perundang-Undangan .....	137
<b>Daftar Riwayat Hidup .....</b>	<b>139</b>